

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu Negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakkan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau mungkin dilanggar. Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya”. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Saat penegak hukum tidak lagi memperlakukan warga negara secara sama maka hal ini merupakan benih-benih ketidakadilan.

Prinsip kesamaan kedudukan didalam hukum salah satu pilar keadilan. Pertanyaan mendasar dalam tulisan ini adalah apakah penegakan hukum di Indonesia sudah mencerminkan pelaksanaan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi hanya karena perbedaan ras, suku, agama, bahasa, budaya, politik. Kesamaan kedudukan dalam hukum menjadi prinsip dalam penegakkan hukum di Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang dimaksud dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut diperlukan regulasi untuk mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala bentuk perbuatan hukum pemerintah dan masyarakat. Pelanggaran termasuk kejahanan yang bersifat komplek. Peningkatan pelanggaran di masyarakat dapat dilihat dari segi jumlah macam pelanggaran yang terjadi. Dimana pelanggaran ini sangat merugikan masyarakat. Manusia sering sekali dihadapkan pada masalah- masalah atau konflik kepentingan antar sesama, maka dalam ketentraman dan teraturnya kehidupan masyarakat hukum sangat dipentingkan. Pelanggaran proyek infrastuktur saat ini terus berjalan dan banyak dilakukan di Indonesia, terutama di Medan, Sumatera Utara. Kota Medan yang menyandang status sebagai Pusat Pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang menuntut kota ini untuk terus berkembang. Seiring dengan itu, tentunya dibutuhkan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang memadai. Secara umum, infrastruktur memiliki arti fasilitas untuk kepentingan umum. Contoh dari infrastruktur adalah jalan-jalan tol, jembatan, bendungan, terminal, dan jaringan listrik. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi yang dibutuhkan untuk aktivitas masyarakat atau perusahaan.

Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah

berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang dapat ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur. Beberapa masalah yang ditumbulkan adalah kurangnya kesadaran dalam membangun infrasatruktur, kurangnya dana, kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur, kendala pembebasan lahan, lambatnya penyusunan peraturan, dan kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur mendasar yang belum merata menyebabkan masih banyaknya desa atau daerah yang tertinggal, kerusakan lingkungan seperti *deforestasi*, erosi tanah, pencemaran air, *displacement* atau relokasi masyarakat dan kemacetan di kota besar.

Faktor yang menyebabkan pelanggaran infrastruktur adalah belum adanya sikap profesionalisme dari pelaku pembangunan maupun pemimpin daerah itu sendiri, belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah dari pihak masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Walikota Medan, Bobby Nasution, bahwa pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 masif dikota Medan, karena pemkot kota itu mempunyai kekuatan anggaran yang memadai. Bobby mengatakan pembangunan dengan anggaran yang memadai itu difokuskan dalam lima program prioritas, yakni kesehatan, kebersihan, infrastruktur penanganan banjir dan penataan kawasan bersejarah dengan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Dinas yang menangani infratruktur, misalnya Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstrusi mempunyai anggaran sebesar Rp1,4 triliun dan Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya Penataan Ruang kota Rp1,2 triliuan yang juga untuk infrastruktur dan pembenahan di kawasan heritage,” jelasnya. Banyaknya pembangunan infrastruktur ini katanya tentu berpengaruh, termasuk menyebabkan kemacetan lalu lintas. Lalu lintas pada 2023 di Medan akan lebih macet

dibandingkan tahun 2022 karena pembangunan lebih banyak dan masif. "Tapi, insya Allah pada 2024, target kami pembangunan infratruktur akan selesai dan tingkat kenyamanan masyarakat Medan akan naik daripada sebelumnya," kata Bobby Nasution yang dalam pertemuan itu didampingi Sekda Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Ferry Ichsan dan Kadis Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane.

Pemko Medan saat ini terus memperkuat pembangunan infrastruktur, terutama jalan di kawasan Medan Utara. Selain ingin memperlancar aktivitas dan mobilitas warga, langkah ini dilakukan WaliKota Medan, Bobby Nasution sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, terutama masyarakat sekitar. Dengan infrastruktur yang bagus, Bobby Nasution optimis akan berdampak positif terhadap akselerasi pemulihan ekonomi masyarakat. Tercatat, ada tiga pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemko Medan di Medan Utara. Pertama, pembangunan¹ jembatan Titi Dua Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan yang pengjerjaannya tengah berjalan. Kemudian, perbaikan Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli dan Jalan Pancing 1, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan yang telah selesai pengjerjaannya. "Pemko Medan akan mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan. Tentunya jika infrastruktur bagus, maka warga yang melaksanakan kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar sehingga berdampak terhadap akselerasi pemulihan ekonomi masyarakat lewat pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan sosial," kata Bobby Nasution. "Kualitas dan ketepatan waktu yang kita kejar. Ini penting agar pengerajan berjalan dengan tetap memperhatikan kualitas, dan bukan kuantitas," ujar WaliKota Medan, Bobby Nasution. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di ibu kota Provinsi

¹ Prokopim Pemko Medan, Bangun Medan Utara Jadi Strategi Bobby Nasution Tingkatkan Ekonomi Daerah., <https://portal.pemkomeden.go.id/>, Sabtu, 18 Juni 2022, 12:57:09., https://portal.pemkomeden.go.id/berita/bangun-medan-utara-jadi-strategi-bobby-nasution-tingkatkan-ekonomi-daerah__read1692.html